

DAMPAK GLOBALISASI PADA PERKEMBANGAN MEGACITIES DI INDONESIA

Oleh Christianto Wibisono

Globalisasi ekonomi dan perkembangan urbanisasi merupakan gejala universal yang tidak dapat dihindari. Untuk mengendalikan megacities perlu diambil langkah-langkah strategis dan demokratis. Berdasarkan pemantauan secara empiris historis tentang perkembangan metropolitan dan globalisasi ekonomi, maka kita diharapkan dapat lebih arif dalam mengambil kebijakan strategis yang berwawasan jauh kedepan.

Globalisasi ekonomi yang sekarang dikundangkan sebagai ciri abad ke XX menurut saya sudah dialami sejak zaman imperialisme modern, dalam menegakkan hubungan ketergantungan antara negara induk kolonial di Eropa dengan daerah jajahan di luar Eropa. Bahkan sebelum kolonialisme Barat menguasai dunia secara dominan, maka interaksi dan transaksi ekonomi inter-regional telah berlangsung dalam skala dan dimensi internasional. Misalnya hubungan dagang antara Sriwijaya, Majapahit, Aceh, dengan India. Arab dan Cina maupun perdagangan di Laut Tengah (Mediterranean) antara Arab, Mesir dengan Romawi, Yunani dan Eropa Selatan. Marcopolo bahkan dikenal sebagai pedagang petualang yang memelopori jalur sutera perdagangan interkontinental antara Eropa lewat Rusia ke Cina dan sebaliknya.

Keunggulan mesin perang dan teknologi barat serta kemampuan administrasi managemennya telah menghasilkan pola kolonialisme dan imperialisme yang menciptakan ketergantungan hampir seluruh koloni kepada induknya. Dengan tercipta Sterling Block, yaitu blok ekonomi di mana Inggris menjadi pusat dan seluruh jajahan tergantung kepada London dan poundsterling. Prancis juga mempunyai wilayah jajahan terluas kedua setelah Inggris, disusul Spanyol, Belanda dan Portugis.

Ekonomi Francophone atau wilayah jajahan Prancis jelas sangat tergantung kepada denyut jantung Paris dan nilai Franc. Bahkan sampai hari ini lebih mudah untuk orang dari suatu negara Afrika bepergian ke ibukota tetangganya melalui transit penerbangan ke Paris dulu baru kemudian balik ke Afrika. Hubungan Batavia dengan Amsterdam lebih akrab daripada dengan Bangkok atau dengan Manila. Jadi internasionalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu bila ditinjau dari hubungan antara

koloni dan negara induk. Untuk skala terbatas, bahkan hubungan perdagangan inter-regional sudah berlangsung sejak zaman yang lebih kuno lagi.

Setelah Perang Dunia II kolonialisme tumbang dan negara Dunia ketiga mulai membangun ekonomi negaranya dengan tekad mandiri dan merubah struktur ketergantungan kepada negara induk. Upaya yang sudah berlangsung hampir dua generasi dihitung sejak 1945 ini tampaknya belum memberikan dampak yang positif, kecuali untuk beberapa negara seperti empat macan Asia.

Peranan sentral ibukota tampaknya sangat dominan di negara induk maupun negara jajahan. Berlin, Roma, London dan Paris misalnya adalah metropolitan yang memborong segalanya di ibukota. Sebenarnya Belanda merupakan contoh unik di mana Amsterdam, Rotterdam dan Den Haag berbagi tugas secara fungsional yang secara harmonis berlangsung hingga dewasa ini. Rotterdam mengandalkan fungsi pelabuhan laut untuk barang, sedangkan Amsterdam sebagai bandar udara pintu gerbang Eropa

Di Indonesia, sebelum perang dunia, Surabaya mempunyai kedudukan unik di sektor perdagangan dan Industri yang bahkan melebihi ibukota Batavia. Posisi Surabaya terhadap Jakarta waktu itu mirip dengan posisi New York terhadap Washington DC. Di zaman Belanda, Surabaya, dan Semarang juga sudah mempunyai bursa. Pangkalan Angkatan Laut Belanda yang sekarang dijadikan PT PAL sudah dikenal sebagai basis strategis dan vital. Semarang bahkan menjadi markas besar perusahaan MNC Cina pertama di Asia Tenggara yaitu konglomerat Oci Tjong Ham Concern yang lahir tahun 1863.

Jika demokrasi ekonomi dijabarkan oleh ISEI sebagai Ekonomi Dasar Terkendali, maka perkembangan perkotaan di Indonesia tampaknya mencerminkan kondisi

- Tulisan ini disampaikan pada Seminar Staf Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung pada tanggal 21 Agustus 1991.
- Christianto Wibisono, Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI).

tersebut dengan berbagai kendala dan dampaknya. Walaupun birokrasi mengakibatkan membengkaknya posisi, peranan dan pengaruh Jakarta sebagai ibukota yang mengarahkan mengendalikan, dan mengelola kecenderungan potensi masyarakat untuk berjubel di Jakarta, secara alamiah, pelbagai kota diluar Jakarta toh tetap tumbuh menjadi metropolitan.

Surabaya sekarang ini sedang mengalami pertumbuhan yang barangkali lebih pesat dari Jakarta, ditinjau dari *demand and supply* pasar yang sudah lebih banyak diserahkan kepada pasar ketimbang kendali birokrasi. Otonomi daerah dan dekonsentrasi serta desentralisasi kebijakan dapat mendorong pertumbuhan daerah lebih cepat dari pusat atau ibukota.

Apabila selama satu generasi, kecenderungan sentralisme sangat terasa, sehingga konsentrasi segala *funds and force* terdapat di Jakarta maka deregulasi, debirokrasi dan de etatisme yang diselenggarakan dengan konsisten dan konsekwen pasti akan memberi kesempatan kepada bangkitnya kekuatan pasar untuk menumbuhkan metropolitan baru diluar Jakarta sesuai dengan kekuatan pasar yang riil.

Dengan tebaran luas wilayah yang mirip benua Eropa dan kontinental Amerika Serikat, memang tidak lucu, tidak logis dan tidak rasional untuk menumpahkan segenap potensi di Jakarta saja sebab pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif strategis bagi kepentingan nasional maupun kualitas hidup warga Jakarta.

Salah satu dari sepuluh Megatrends 1980-an yang diuraikan John Naisbitt adalah pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. Kita memang harus secara antisipatif mengarahkan kebijakan pengelolaan negara agar alokasi dan distribusi faktor-faktor pembanguann lebih merata dan lebih menjamin pertumbuhan yang tersebar keseluruh pelosok tanah air.

PBB memproyeksikan pada tahun 2000 nanti Mexico dan Sao Paulo akan menjadi megalopolis dengan 25,8 juta dan 24 juta penduduk. Tokyo ditempat ketiga dengan 20,3 juta sedang Jakarta bersama dengan New Delhi dan Buenos Aires ditempat ke 11 dengan penduduk 13,2 juta. Perkembangan Jakarta sangat luar biasa, sebab di tahun 1950 baru 1,8 juta dan Buenos Aires sudah 5,3 juta dan menduduki peringkat ke-9. Tahun 1980 Jakarta 6,7 juta Buenos Aires 10,1 juta. Dalam tempo 20 tahun sejak 1980 Jakarta akan tumbuh dua kali lipat, sementara Buenos Aires hanya tumbuh 30,77 %. 16 dari 25 kota terbesar didunia tahun 2000 terletak di negara berkembang.

Pemantauan empiris historis tentang perkembangan metropolitan dan globalisasi ekonomi menuntut kearifan kita untuk mengambil kebijakan strategis yang berwawasan jauh kedepan.

1. Perlunya Suatu UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang mencerminkan keadilan dan proporsi

yang memadai bagi daerah, sehingga Daerah juga mempunyai kemampuan membangun dan merangsang arus investasi secara lebih menyebar keseluruh peloksok. Hal ini perlu segera dirumuskan.

2. Prinsip otonomi daerah, dekonsentrasi dan desentralisasi harus dijabarkan dan diterapkan secara lebih konsisten, konsekuen dan substansial dengan institusi yang jelas, konkret dan operasional ketimbang teori atau wadah yang kabur.
3. Alokasi sumber dana dan daya seharusnya memperhatikan dimensi kepentingan umum masyarakat secara komprehensif, agar efisiensi nasional dan efisiensi sosial dapat dicapai secara optimal. Misalnya investasi prasarana sosial seperti Mass Rapid Transit untuk jaringan urban harus memperoleh prioritas ketimbang jalan Tol dan mobil pribadi.
4. Indonesia barangkali secara fisik memiliki pakar teknologi dan planologi perkotaan yang bisa belajar dari bangsa lain. Tapi yang diperlukan ialah kepekaan akan problematik kesenjangan sosial. Kekurangan prasarana sosial dan pengendalian ekonomi pasar yang cenderung berorientasi kepada high class consumptive elite, hingga efisiensi sosial sangat tertinggal jauh.
5. Dalam era globalisasi berdasar pengalaman dan kenyataan bahwa kepadatan penduduk perkotaan Dunia Ketiga semakin membengkak sedang negara demokrasi industrial dapat mempertahankan stabilitas penduduk sekaligus dekonsentrasi populasi, maka saya melihat hubungan timbal balik, kausalitas bahwa sistem demokrasi yang efektif akan merupakan pola rekayasa sosial yang tangguh dalam mengendalikan arus urbanisasi. Jika sistem sosial tidak demokratis, maka penduduk akan cenderung berkonsentrasi mendekati pusat-pusat kekuasaan sehingga daerah kurang berperan dan keadaan sedemikian berlangsung saling memperkokoh.

Kesimpulan

Globalisasi ekonomi dan perkembangan urbanisasi merupakan gejala universal yang tidak dapat dihindari. Bila kita ingin mengendalikan pertumbuhan megacities, maka untuk menghindari konsentrasi megacities, perlu diambil langkah strategis untuk demokratisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi yang memerlukan kerangka institusi, perundang-undangan dan alokasi sumber dana dan daya secara efisien dan efektif dengan memperhatikan fungsi penyebaran dan pemerataan ke seluruh wilayah tanah air.

Jelaslah bahwa masalah urbanisasi, planologi dan teknologi pengendalian urbanisasi, memerlukan kemauan politik dan tindakan politik yang menyadari pentingnya sistem yang tanggap, tangguh dan cangguh untuk menghadapi tantangan kuantitatif maupun kualitatif dari dampak negatif megacities □